

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ekonomi Indonesia umumnya masih ditopang oleh sektor primer yaitu pertanian. Hal ini dibuktikan oleh masih banyak terserapnya tenaga kerja pada sektor pertanian. Indonesia mulai melirik sektor sekunder yaitu sektor industri sebagai salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia. Banyak cara yang sudah dilakukan Indonesia untuk terus mendorong sektor industri khususnya manufaktur. Namun masih terdapat kendala dalam mengembangkan industri manufaktur yang disebabkan oleh pemakaian teknologi yang masih sederhana. Selain manufaktur juga terdapat industri lain yang masih dikembangkan di Indonesia misalnya industri jasa. Industri jasa berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Banyak sektor-sektor riil yang berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala. Oleh karena itu pemerintah Indonesia tetap berusaha untuk mendorong kinerja perekonomian agar semakin baik. Salah satu indikator atau tolak ukur perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah data pertumbuhan ekonomi 34 provinsi di Indonesia tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2016-2021 (Dalam Persen)**

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37	2,79
Sumatera Utara	5,18	5,21	5,18	5,22	-1,07	2,61
Sumatera Barat	5,27	5,3	5,14	5,01	-1,62	3,29
Riau	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,13	3,36
Jambi	4,37	4,6	4,69	4,35	-0,44	3,66
Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11	3,58
Bengkulu	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02	3,24
Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67	2,79
Kep. Bangka Belitung	4,1	4,47	4,45	3,32	-2,3	5,05
Kep. Riau	4,98	1,98	4,47	4,83	-3,8	3,43
DKI Jakarta	5,87	6,2	6,11	5,82	-2,39	3,56
Jawa Barat	5,66	5,33	5,65	5,02	-2,52	3,74
Jawa Tengah	5,25	5,26	5,30	5,36	-2,65	3,32
DI Yogyakarta	5,05	5,26	6,20	6,59	-2,68	5,53
Jawa Timur	5,57	5,46	5,47	5,53	-2,33	3,57
Banten	5,28	5,75	5,77	5,26	-3,39	4,44
Bali	6,33	5,56	6,31	5,6	-9,33	-2,47
Nusa Tenggara Barat	5,81	0,09	-4,50	3,9	-0,62	2,3
Nusa Tenggara Timur	5,12	5,11	5,11	5,25	-0,84	2,51
Kalimantan Barat	5,2	5,17	5,07	5,09	-1,82	4,78
Kalimantan Tengah	6,35	6,73	5,61	6,12	-1,41	3,4
Kalimantan Selatan	4,4	5,28	5,08	4,09	-1,82	3,48
Kalimantan Timur	-0,38	3,13	2,64	4,7	-2,87	2,48
Kalimantan Utara	3,55	6,8	5,36	6,89	-1,09	3,98
Sulawesi Utara	6,16	6,13	6	5,65	-0,99	4,16
Sulawesi Tengah	9,94	7,1	20,6	8,83	4,86	11,7
Sulawesi Selatan	7,42	7,21	7,04	6,91	-0,71	4,65
Sulawesi Tenggara	6,51	6,76	6,4	6,5	0,65	4,1
Gorontalo	6,52	6,73	6,49	6,4	-0,02	2,41
Sulawesi Barat	6,01	6,39	6,26	5,56	-2,4	2,56
Maluku	5,73	5,82	5,91	5,41	-0,92	3,04
Maluku Utara	5,77	7,67	7,86	6,25	5,35	16,4
Papua Barat	4,52	4,02	6,25	2,66	-0,76	-0,51
Papua	9,14	4,64	7,32	-15,74	2,39	15,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 sebagian provinsi di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di karenakan virus *Covid-19* yang menyerang seluruh dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu provinsi di Pulau Jawa yang terkena dampak covid-19 ialah Provinsi D.I Yogyakarta yang menurunkan angka pertumbuhan ekonomi menjadi -2,68% pada tahun 2020 padahal pada tahun sebelumnya yakni 2019 berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi selama enam tahun terakhir yakni 6,59%. Berikut merupakan pertumbuhan ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta menurut Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta (2021) selama enam tahun terakhir yakni tahun 2016 sampai 2021:



**Gambar 1. 1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2016-2021 (Dalam Persen)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Pertumbuhan Ekonomi, BPS Indonesia. 2021

Berdasarkan grafik di atas laju pertumbuhan ekonomi D.I Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% yang meningkat menjadi 5,26% pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,94%. Selanjutnya, di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan sebesar 0,39%. Peningkatan di tahun 2019 tidak sebanyak di tahun 2018 hal ini disebabkan karena di penghujung tahun 2019 dunia sedang di guncang dengan virus *covid-19* yang meluas sehingga pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis hingga menyentuh angka negatif sebesar - 2,68%. Angka negatif ini jika di bandingkan tahun 2019 terdapat penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 9,15%. Setelah mengalami penurunan di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta kembali meningkat di tahun 2021 sebesar 5,53%.

Pertumbuhan ekonomi yang menurun ini mengindikasikan terjadi perubahan ekonomi pada Provinsi DI Yogyakarta. Perubahan ekonomi tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah UMR. Upah Minimum Regional (UMR) adalah upah minimum yang di tetapkan oleh Gubernur sebagai dasar pendapatan tenaga kerja suatu daerah. Upah minimum di D.I Yogyakarta selalu meningkat disetiap tahunnya.

Upah minimum merupakan langkah untuk mencapai pendapatan yang memadai bagi kesejahteraan karyawannya dengan fokus pada aspek kinerja dan

pengembangan perusahaan. Definisi upah minimum tahunan selalu menjadi topik diskusi antara pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja. Upah minimum pada tahun 2013 secara signifikan lebih tinggi daripada selama krisis keuangan 1997. Kenaikan upah minimum bagi dunia bisnis bukanlah hal yang mudah, terutama benar ketika ekonomi sedang dalam gejolak dan bisnis berada di bawah tekanan dari kenaikan biaya produksi dan transaksi. Tujuan utama dari diadakannya penetapan UMR adalah untuk menjaga daya beli masyarakat karena adanya kenaikan tersebut (Septi, 2017). Berikut merupakan data Upah Minimum di Provinsi D.I Yogyakarta selama enam tahun terakhir yakni tahun 2016 hingga 2021:



Gambar 1.2 Grafik Upah Minimum di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2016-2021 (Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Upah Minimum, BPS D.I Yogyakarta 2022

Berdasarkan data grafik di atas, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) D.I

Yogyakarta, upah minimum di Provinsi D.I Yogyakarta mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Upah minimum di D.I Yogyakarta tahun 2016 sebesar Rp 1.182.510. Pada tahun 2017 upah minimum di Provinsi D.I Yogyakarta meningkat 1,55 % atau sebesar Rp 155.135 dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 upah minimum di Provinsi D.I Yogyakarta meningkat 1,16% atau sebesar Rp 116.509 dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2019 upah minimum di Provinsi D.I Yogyakarta meningkat 1,17% atau sebesar Rp 116.769 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 upah minimum di Provinsi D.I Yogyakarta meningkat 1,33% atau sebesar Rp 133.685 dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021 upah minimum di Provinsi D.I Yogyakarta meningkat 0,6 % sebesar Rp. 60.392. Jika dibandingkan dari tahun 2016 kenaikan upah minimum yang paling sedikit adalah pada tahun 2021. Upah minimum di Provinsi D.I Yogyakarta tergolong paling rendah dari 38 Provinsi di Indonesia. Upah minimum tertinggi di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah Rp. 4.276.349 di tahun 2021 sedangkan di Provinsi D.I Yogyakarta sebesar Rp. 1.765.000 di tahun 2021 (Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta, 2021).

Selain UMR terdapat faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yakni inflasi. Menurut teori Sadono Sukirno inflasi adalah proses yang meningkatkan harga secara keseluruhan dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi yang terkendali akan meningkatkan

keuntungan pengusaha dan meningkatkan keuntungan sehingga akan mendorong investasi masa depan dan pada akhirnya mempercepat proses penciptaan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial politik (Sutawajaya, 2012).

Dampak negatif inflasi terhadap perekonomian antara lain berkurangnya minat investor, pertumbuhan ekonomi yang kurang, penurunan distribusi pendapatan, dan penurunan pembelian masyarakat. Berikut adalah data inflasi provinsi DI Yogyakarta menurut Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta (2021) selama enam tahun terakhir yakni tahun 2016 hingga 2021 yaitu:



Gambar 1. 3 Grafik Laju Inflasi Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2016-2021 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik Inflasi, BPS D.I Yogyakarta. 2022

Berdasarkan grafik diatas laju inflasi di D.I Yogyakarta mengalami naik turun di setiap tahunnya. Inflasi di D.I Yogyakarta tahun 2016 sebesar 2,29%. Pada tahun 2017 inflasi di provinsi D.I Yogyakarta sebesar 4,20%. Jika di bandingkan dari tahun sebelumnya inflasi meningkat sebesar 1,91%. Kemudian pada tahun 2018 inflasi di provinsi D.I Yogyakarta sebesar 2,66%. Jika di bandingkan dari tahun sebelumnya inflasi mengalami penurunan sebesar 1,54%. Selanjutnya pada tahun 2019 inflasi di provinsi D.I Yogyakarta sebesar 2,77%. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,11%. Pada tahun 2020 inflasi di provinsi D.I Yogyakarta sebesar 1,40%. Jika di bandingkan dari tahun sebelumnya inflasi mengalami penurunan kembali sebesar 1,37%. Pada tahun 2021 inflasi di provinsi D.I Yogyakarta meningkat menjadi sebesar 2,29%. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya inflasi kembali mengalami kenaikan sebesar 0,89% (Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta, 2021). Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat masalah lebih dalam tentang pertumbuhan ekonomi dengan penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Upah Minimum Regional dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya variabel dependen (Y) yaitu pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel independen (X) diantaranya Upah Minimum Regional (X1) dan Inflasi (X2).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2021 dimana pada tahun tersebut provinsi D.I Yogyakarta mengalami penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemic *covid-19* pada tahun 2020. Faktor upah minimum regional dan inflasi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi D.I Yogyakarta. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan pertanyaan-pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi D.I. Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi D.I. Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum regional (UMR) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi D.I Yogyakarta.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai bahan masukan terhadap masalah perubahan pertumbuhan ekonomi provinsi DI Yogyakarta dan dapat mengurangi permasalahan tersebut.

2. Bagi Akademisi,

Manfaat bagi bidang akademisi yaitu sebagai media referensi dan mendalami informasi terkait analisis pengaruh upah minimum regional terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta dan sebagai media penyalur mahasiswa untuk mengembangkan, menerapkan dan memberi informasi tentang penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Penulis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai analisis pengaruh upah minimum regional dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta

4. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi pembaca sebagai

referensi mengenai penelitian pengaruh upah minimum regional terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I Yogyakarta.

### **1.5 Sistematika**

Secara garis besar penulis penelitian ini direncanakan akan dibagi menjadi lima bagian yang terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang masalah merupakan landasan pemikiran secara garis besar.

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan atau fenomena yang memerlukan pemecahan melalui suatu penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Sistematika penulisan menjelaskan tentang uraian ringkas dari setiap bab pada skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka konseptual adalah skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat permasalahan yang diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan data dan pengolahan data. Berisi penjelasan mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, defisi operasional variabel, teknik analisis data yang digunakan.

### BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil analisis data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan. Memberikan pembahasan terhadap hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk argumentasi atau dasar pbenarannya.

### BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil pengolahan data dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.